

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

5.1 Analisis Data

5.1.1 Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan Pada BPKAD Tahun 2020-2024

Pada setiap organisasi pemerintah daerah, termasuk BPKAD, realisasi anggaran pendapatan memiliki peranan penting dalam mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Realisasi pendapatan yang optimal menunjukkan bahwa instansi mampu menghimpun sumber-sumber pendapatan sesuai dengan target yang sudah direncanakan dalam APBD. Dengan demikian, penting guna mengamati perkembangan realisasi anggaran pendapatan dari tahun ke tahun sebagai dasar dalam menilai kinerja keuangan serta sebagai bahan evaluasi terhadap capaian yang telah diraih, Bagian ini menguraikan tentang dinamika perkembangan realisasi anggaran pendapatan BPKAD Kota Jambi selama lima tahun belakangan, melalui tahun 2020 hingga 2024, yang ditampilkan pada Tabel 5.1 dibawah:

**Tabel 5. 1 Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan BPKAD
Tahun 2021-2024**

| Tahun | Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp) | Realisasi Tahun ini (Rp) | Perkembangan | Kriteria |
|--------------|--|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| 2021 | 1.621.827.275.396 | 1.652.948.449.754 | 1,6 | S |
| 2022 | 1.652.948.449.754 | 1.688.797.755.118 | 1,7 | S |
| 2023 | 1.688.797.755.118 | 1.662.743.583.686 | 1,7 | S |
| 2024 | 1.662.743.583.686 | 1.765.182.353.921 | 1,8 | S |

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Keterangan :

S = Stabil

Sesuai dengan Tabel 5.1, peneliti menyimpulkan bahwa Berdasarkan data perkembangan realisasi anggaran pendapatan dari tahun 2021 hingga 2024, diketahui bahwa persentase perbandingan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami peningkatan secara bertahap, meskipun berada pada kategori stabil. Pada tahun 2021, terjadi pertumbuhan

sebesar 1,6% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh mulai pulihnya aktivitas ekonomi pasca pandemi COVID-19 serta meningkatnya efisiensi dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya, pada tahun 2022, persentase pertumbuhan meningkat menjadi 1,7%. Hal ini disebabkan oleh optimalisasi pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah yang mendukung pelaporan dan pelacakan pendapatan secara real-time.

Namun, pada tahun 2023, meskipun persentasenya tetap di angka 1,7%, secara nominal terjadi penurunan pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain fluktuasi ekonomi makro, penurunan daya beli masyarakat, serta belum optimalnya realisasi dana transfer dari pusat. Meski demikian, pada tahun 2024, realisasi pendapatan mengalami peningkatan kembali, mencapai 1,8%, yang masih tergolong stabil. Peningkatan ini disebabkan oleh strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, serta meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran tepat waktu, didukung oleh digitalisasi sistem pelayanan pajak daerah.

Tabel 5. 2 Perkembangan Target Pendapatan BPKAD Tahun 2021-2024

| Tahun | Target Tahun Sebelumnya (Rp) | Target Tahun ini (Rp) | Perkembangan | Kriteria |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 2021 | 1.617.658.414.714 | 1.658.405.928.034 | 1,6 | S |
| 2022 | 1.658.405.928.034 | 1.670.844.905.471 | 1,7 | S |
| 2023 | 1.670.844.905.471 | 1.755.751.906.289 | 1,7 | S |
| 2024 | 1.755.751.906.289 | 1.886.534.704.938 | 1,9 | S |

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Sesuai pada tabel 5.2 peneliti menyimpulkan bahwa Berdasarkan data perkembangan target pendapatan BPKAD Kota Jambi dari tahun 2021 hingga 2024, terlihat bahwa persentase peningkatan target berada pada kisaran 1,6% hingga 1,9% dan dikategorikan stabil setiap tahunnya. Pada tahun 2021, target pendapatan meningkat sebesar 1,6% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan optimisme pemerintah daerah terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi serta upaya mengembalikan kapasitas fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2022,

target kembali dinaikkan sebesar 1,7%, sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi yang mulai mengalami perbaikan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, pada tahun 2023, target kembali naik sebesar 1,7%, yang didasari oleh rencana pemerintah untuk memperluas cakupan pendapatan daerah, termasuk optimalisasi pendapatan dari sumber-sumber lain seperti dana transfer dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Di tahun 2024, target pendapatan mengalami kenaikan tertinggi selama periode tersebut, yakni sebesar 1,9%. Hal ini disebabkan oleh strategi peningkatan intensitas penggalian PAD melalui digitalisasi sistem pemungutan dan perluasan basis pajak daerah, serta adanya proyeksi pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih positif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, kenaikan target yang konsisten menunjukkan kehati-hatian pemerintah daerah dalam menyusun target pendapatan yang realistis, sambil tetap memperhatikan potensi penerimaan dan kondisi ekonomi aktual.

5.1.2 Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja Pada BPKAD Tahun 2020-2024

Belanja daerah menjadi satu diantara unsur utama pada APBD yang mencerminkan Tingkat kemampuan pemerintah daerah ketika mengimplementasikan program juga kegiatan yang sudah disusun. Kinerja realisasi belanja sangat penting untuk dianalisis karena menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran oleh perangkat daerah, termasuk BPKAD. Melalui analisis realisasi anggaran belanja, dapat diketahui tingkat efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Dengan demikian, dalam bagian ini ditampilkan data terkait perkembangan realisasi anggaran belanja

BPKAD Kota Jambi selama periode 2020 hingga 2024, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5.2 dibawah:

Tabel 5. 3 Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja BPKAD Tahun 2020-2024

| Tahun | Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp) | Realisasi Tahun ini (Rp) | Perkembangan | Kriteria |
|-------|---------------------------------|--------------------------|--------------|----------|
| 2021 | 1.665.932.584.837 | 1.740.357.878.019 | 1,7 | S |
| 2022 | 1.740.357.878.019 | 1.622.747.432.178 | 1,6 | S |
| 2023 | 1.622.747.432.178 | 1.720.255.456.671 | 1,7 | S |
| 2024 | 1.720.255.456.671 | 1.800.252.368.262 | 1,8 | S |

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Keterangan :

S = Stabil

Sesuai dengan Tabel 5.3, peneliti menyimpulkan bahwa perkembangan realisasi anggaran belanja BPKAD dari tahun 2021 hingga 2024 dikategorikan stabil. Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 1,7% yang juga dikategorikan stabil, seiring dengan meningkatnya belanja untuk pemulihan ekonomi dan penguatan infrastruktur pelayanan publik. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan kembali ke angka 1,6% yang masih tergolong stabil, disebabkan oleh pengendalian anggaran dan pergeseran prioritas belanja ke sektor yang lebih mendesak. Tahun 2023 mencatatkan peningkatan menjadi 1,7% akibat percepatan realisasi program strategis serta pembiayaan kegiatan akhir tahun anggaran. Selanjutnya, pada tahun 2024, realisasi belanja meningkat menjadi 1,8% yang tetap dikategorikan stabil.

Tabel 5. 4 Target Perkembangan Belanja BPKAD Tahun 2021-2024

| Tahun | Target Tahun Sebelumnya (Rp) | Target Tahun ini (Rp) | Perkembangan | Kriteria |
|-------|------------------------------|-----------------------|--------------|----------|
| 2021 | 1.826.930.849.781 | 1.961.694.919.058 | 2,0 | S |
| 2022 | 1.961.694.919.058 | 1.812.832.658.629 | 1,8 | S |
| 2023 | 1.812.832.658.629 | 1.863.794.648.856 | 1,9 | S |
| 2024 | 1.863.794.648.856 | 1.928.586.899.927 | 1,9 | S |

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Sesuai dengan Tabel 5.3, peneliti menyimpulkan bahwa Berdasarkan data perkembangan target pendapatan BPKAD Kota Jambi dari tahun 2021 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa kenaikan target dari tahun ke tahun berada dalam kategori stabil, dengan persentase perbandingan berkisar antara 1,8% hingga 2,0%. Pada tahun 2021, target pendapatan meningkat sebesar 2,0% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini merupakan respon dari optimisme pemerintah daerah terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, yang disertai dengan meningkatnya proyeksi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer pusat.

Namun, pada tahun 2022, target pendapatan mengalami penurunan menjadi 1,8%. Penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian terhadap kondisi fiskal yang lebih konservatif, di mana pemerintah memperkirakan potensi pendapatan mengalami perlambatan karena belum sepenuhnya pulihnya sektor-sektor ekonomi unggulan daerah, serta kebijakan pengendalian belanja secara nasional. Pada tahun 2023, target kembali dinaikkan menjadi 1,9%, seiring dengan perbaikan indikator ekonomi daerah, serta kebijakan daerah yang mendorong digitalisasi layanan perpajakan daerah dan intensifikasi pendapatan dari sektor retribusi.

Selanjutnya, pada tahun 2024, target pendapatan ditingkatkan lagi sebesar 1,9%, tetap dalam kategori stabil. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga pertumbuhan fiskal yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kapasitas ekonomi riil masyarakat dan kemampuan pemungutan pendapatan daerah secara optimal. Secara keseluruhan, fluktuasi dalam tingkat kenaikan target pendapatan ini

mencerminkan penyesuaian antara ekspektasi fiskal dan kondisi ekonomi aktual yang dinamis.

5.2 Analisis Kinerja Anggaran Pada BPKAD Kota Jambi Dilihat Dari Rasio Efektivitas, Rasio Serapan Anggaran Belanja dan Rasio Efisiensi

5.2.1 Analisis Rasio Efektivitas BPKAD Kota Jambi Tahun 2020-2024

Salah satu tolok ukur yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja tersebut adalah rasio efektivitas, yang mengukur tingkat keberhasilan BPKAD untuk memenuhi pencapaian pendapatan daerah berdasarkan target yang dibuat. Rasio tersebut memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemerintah daerah memiliki kompetensi, khususnya BPKAD, dalam mengelola berbagai jenis pemasukan secara efisien tepat sasaran. Berikut pada tabel 5.2.1, hasil analisis rasio efektivitas BPKAD Kota Jambi tahun 2020-2024 yaitu:

Tabel 5. 5 Analisis Rasio Efektivitas BPKAD Kota Jambi Tahun 2020-2024

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Kriteria |
|-------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| 2020 | 1.617.658.414.714 | 1.621.827.275.396 | 100,26 | SE |
| 2021 | 1.658.405.928.034 | 1.652.948.449.754 | 99,67 | E |
| 2022 | 1.670.844.905.471 | 1.668.797.755.118 | 99,88 | E |
| 2023 | 1.755.751.906.289 | 1.662.743.583.686 | 94,70 | E |
| 2024 | 1.886.534.704.938 | 1.765.182.353.921 | 93,55 | E |

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Keterangan :

SE = Sangat Efektif

E = Efektif

Berdasarkan tabel 5.3 peneliti menyimpulkan kinerja anggaran BPKAD Kota Jambi dalam hal efektivitas realisasi pendapatan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan hasil yang cukup stabil, meskipun terdapat sedikit penurunan melalui tahun ke tahun. Saat tahun 2020 rasio efektivitas mencapai 100,26%, yang menunjukkan kinerja sangat efektif. Perihal tersebut mempunyai arti realisasi pendapatan melebihi target yang telah ditetapkan, mencerminkan pengelolaan pendapatan yang sangat baik juga perencanaan anggaran secara realistis. Pada tahun 2021 rasio efektivitas sebesar 99,67%,

masih dalam kategori sangat efektif. Capaian ini menunjukkan bahwa BPKAD tetap mampu merealisasikan pendapatan hampir sepenuhnya sesuai target, meskipun mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 efektivitas berada pada 99,88%, yang juga termasuk sangat efektif. Kinerja tahun ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 2021, menandakan adanya perbaikan dalam upaya pengumpulan pendapatan daerah. Pada tahun 2023 Rasio efektivitas menurun menjadi 94,70%, masuk kategori cukup efektif. Penurunan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan realisasi pendapatan, yang kemungkinan disebabkan oleh peningkatan target yang tidak sebanding dengan kemampuan realisasi. Pada tahun 2024 tingkat efektivitas kembali mengalami penurunan menjadi 93,55%, juga masih berada pada kategori cukup efektif. Perihal tersebut memperlihatkan bahwasanya meskipun pendapatan tetap direalisasikan dalam jumlah besar, terdapat tantangan dalam mencapai target yang lebih tinggi.

Penurunan efektivitas realisasi anggaran pendapatan BPKAD Kota Jambi melalui tahun ke tahun dikarenakan atas sejumlah faktor. Saat tahun 2020 realisasi pendapatan sangat tinggi disebabkan oleh adanya pelampauan target atau perencanaan yang sangat hati-hati akibat ketidakpastian di awal pandemi COVID-19, pemerintah daerah cenderung menetapkan target yang realistis bahkan rendah, sehingga realisasi bisa melampaui target. Pada tahun 2021 terjadi penurunan kecil dibandingkan 2020, hal ini di pacu oleh dampak lanjutan pandemi, yang dimulai berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah, terutama dari pajak retribusi. Meskipun tetap tinggi, tekanan ekonomi menyebabkan sedikit penurunan capaian. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sedikit melalui tahun sebelumnya. Perihal tersebut menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi, di mana aktivitas masyarakat mulai normal, dan pendapatan daerah kembali meningkat. Pada tahun 2023 penurunan signifikan disebabkan target pendapatan yang terlalu tinggi, ketidakpastian ekonomi global dan nasional, dan kurangnya optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, atau kendala

teknis dalam pengelolaan pendapatan. Pada tahun 2024 Penurunan kembali terjadi, meskipun secara nominal pendapatan masih tinggi penyebabnya karena kenaikan anggaran yang terlalu ambisius, Ketergantungan terhadap transfer pusat, serta faktor administrasi atau hambatan teknis dalam penarikan atau pencatatan pendapatan.

5.2.2 Analisis Rasio Serapan Anggaran Belanja BPKAD Kota Jambi Tahun 2020-2024

Analisis rasio serapan anggaran belanja menjadi satu diantara metode evaluasi yang dipergunakan dalam penilaian seberapa besar efektivitas pelaksanaan anggaran belanja dari total anggaran yang telah ditetapkan. Rasio ini mencerminkan kinerja keuangan suatu instansi dalam memanfaatkan dana publik secara efisien dan bertanggung jawab. Hasil analisis rasio serapan anggaran belanja BPKAD Kota Jambi Tahun 2020-2024 yaitu:

Tabel 5. 6 Analisis Rasio Serapan Anggaran Belanja BPKAD Kota Jambi Tahun 2020-2024

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Kriteria |
|-------|-------------------|-------------------|-------|----------|
| 2020 | 1.826.930.849.781 | 1.665.932.584.837 | 91,19 | CB |
| 2021 | 1.961.694.919.058 | 1.740.357.878.019 | 88,72 | KB |
| 2022 | 1.812.832.658.629 | 1.622.747.432.178 | 89,51 | KB |
| 2023 | 1.863.794.648.856 | 1.720.255.456.671 | 92,30 | CB |
| 2024 | 1.928.586.899.927 | 1.800.252.368.262 | 93,35 | CB |

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Keterangan :

CB = Cukup Baik

KB = Kurang Baik

Sesuai dengan tabel 5.4, bisa diambil simpulan bahwasanya tingkat serapan anggaran belanja BPKAD Kota Jambi selama periode 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, realisasi anggaran mencapai 91,19% yang dikategorikan cukup baik. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 88,72% dan 89,51% yang termasuk dalam kategori kurang baik. Meskipun demikian, saat tahun 2023 juga 2024 terjadi peningkatan kembali beserta capaian masing-masing senilai 92,30% dan 93,35% yang kembali masuk dalam kategori cukup baik. Secara

keseluruhan, meskipun terdapat dua tahun dengan kinerja kurang baik, BPKAD berhasil menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan anggaran belanjanya pada dua tahun terakhir, yang mencerminkan adanya upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan anggaran.

Perbedaan persentase rasio serapan anggaran belanja BPKAD Kota Jambi selama periode 2020–2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berdampak pada penurunan maupun kenaikan realisasi anggaran per tahun. Saat tahun 2020, rasio serapan hingga 91,19% dengan kategori cukup baik, yang mencerminkan pelaksanaan program kerja berjalan cukup optimal meskipun pada saat kondisi pandemi COVID-19. Namun, saat tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 88,72% (kategori kurang baik), kemungkinan disebabkan oleh kendala administratif, penyesuaian kebijakan akibat dampak lanjutan pandemi, serta refocusing anggaran. Tahun 2022 masih menunjukkan kategori kurang baik dengan nilai 89,51%, yang dapat diakibatkan oleh proses pelaksanaan kegiatan yang belum maksimal dan adanya pergeseran prioritas belanja. Peningkatan terjadi pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing menjadi 92,30% dan 93,35% (kategori cukup baik), yang memperlihatkan terdapatnya perbaikan pada perencanaan maupun pelaksanaan anggaran, serta peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan dalam menyerap anggaran secara lebih tepat waktu dan tepat sasaran.

5.2.3 Analisis Rasio Efisiensi BPKAD Kota Jambi tahun 2020-2024

Analisis rasio efisiensi merupakan salah satu tolak ukur utama untuk mengukur tingkat efektivitas penggunaan anggaran oleh suatu instansi pemerintah, termasuk BPKAD. Rasio mengukur perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran yang sudah ditentukan, yang mencerminkan efisiensi maupun tidak efisien dalam pelaksanaan kegiatan

keuangan. Berikut hasil analisis rasio efisiensi BPKAD Kota Jambi tahun 2020-2024:

Tabel 5. 7 Analisis Rasio Efisiensi BPKAD Kota Jambi tahun 2020-2024

| Tahun | Realisasi Belanja (Rp) | Realisasi Pendapatan (Rp) | % | Kriteria |
|-------|------------------------|---------------------------|--------|----------|
| 2020 | 1.665.932.584.837 | 1.621.827.275.396 | 102,71 | TE |
| 2021 | 1.740.357.878.019 | 1.652.948.449.754 | 105,28 | TE |
| 2022 | 1.622.747.432.178 | 1.668.797.755.118 | 97,24 | KE |
| 2023 | 1.720.255.456.671 | 1.662.743.583.686 | 103,45 | TE |
| 2024 | 1.800.252.368.262 | 1.765.182.353.921 | 101,98 | TE |

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Keterangan :

TE : Tidak Efisien

KE : Kurang Efisien

Sesuai dengan tabel 5.5 bisa diambil simpulan bahwasanya tingkat efisiensi anggaran belanja pada BPKAD Kota Jambi selama periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang kurang optimal. Pada tahun 2020, 2022, 2023, dan 2024, rasio efisiensi berada pada angka 100% atau lebih, yang mengindikasikan bahwa realisasi anggaran melebihi atau setara dengan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga masuk pada kategori tidak efisien. hanya saat tahun 2021, rasio efisiensi mencapai 97,24%, yang tergolong kurang efisien. Perihal tersebut memperlihatkan bahwasanya sepanjang lima tahun belakangan, pengelolaan anggaran belanja masih belum sepenuhnya efisien dan perlu evaluasi yang lebih mendalam agar alokasi dan pelaksanaan anggaran dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip efisiensi anggaran pemerintah daerah.

Penyebab terjadinya penurunan dan keikan pada rasio efisiensi belanja terhadap pendapatan mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024, yang mencerminkan adanya dinamika dalam pengelolaan anggaran daerah. Pada tahun 2020, rasio efisiensi tercatat sebesar 102,71% dan dikategorikan tidak efisien, yang disebabkan oleh tingginya realisasi belanja dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, terutama karena pengeluaran mendesak

dalam penanganan pandemi COVID-19. Tahun 2021 mengalami kenaikan rasio menjadi 105,28%, masih dalam kategori tidak efisien, yang dipengaruhi oleh percepatan program pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan belanja operasional serta belanja langsung untuk pelayanan publik. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan pada rasio efisiensi menjadi 97,24%, yang menunjukkan perbaikan kinerja fiskal meskipun masih tergolong kurang efisien. Penurunan ini disebabkan oleh pengendalian belanja dan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, di mana belanja dapat ditekan lebih rendah dibandingkan pendapatan yang berhasil dikumpulkan. Pada tahun 2023, rasio kembali naik ke angka 103,45% dan masuk kategori tidak efisien, yang disebabkan oleh peningkatan belanja menjelang akhir tahun anggaran, termasuk untuk belanja modal dan kegiatan strategis. Tahun 2024 menunjukkan sedikit perbaikan dengan rasio efisiensi sebesar 101,98%, namun masih tergolong tidak efisien karena realisasi belanja tetap lebih tinggi dibandingkan pendapatan, yang kemungkinan besar disebabkan oleh belanja prioritas seperti proyek pembangunan dan peningkatan sistem layanan keuangan daerah.

5.3 Analisis Ekonomi

Dalam perspektif ekonomi daerah, anggaran yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi fiskal, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efisien dan efektif memberikan dampak langsung terhadap dinamika ekonomi, khususnya dalam meningkatkan daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat stabilitas fiskal daerah.

Selama periode 2020 hingga 2024, realisasi anggaran belanja BPKAD menunjukkan tren yang relatif stabil, meskipun disertai dengan fluktuasi tingkat efisiensi. Pada awal pandemi COVID-19 tahun 2020, belanja pemerintah daerah menjadi penopang utama pergerakan ekonomi, di tengah menurunnya aktivitas sektor swasta. Realisasi belanja yang tinggi pada tahun

tersebut terbukti mampu menjaga keberlangsungan program-program pelayanan publik dan pemulihan ekonomi lokal, seperti program bantuan sosial, pengadaan alat kesehatan, serta stimulus bagi pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah memiliki peran dalam menjaga stabilitas makroekonomi di level lokal.

Memasuki tahun 2021 hingga 2022, meskipun terjadi peningkatan pada sisi pendapatan dan stabilitas serapan anggaran, rasio efisiensi menunjukkan ketidakseimbangan antara belanja dan pendapatan. Tidak efisien ini, yang tercermin dari rasio efisiensi di atas 100%, mengindikasikan bahwa belanja yang dilakukan masih belum sebanding dengan pendapatan yang diperoleh, sehingga memunculkan potensi ketergantungan terhadap pembiayaan defisit atau pengeluaran yang tidak memberikan nilai tambah ekonomi secara optimal. Dalam konteks ekonomi, hal ini dapat menyebabkan alokasi sumber daya publik menjadi kurang produktif.

Namun demikian, peran BPKAD dalam menjaga kesinambungan fiskal tetap terlihat dari upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan dana transfer pusat secara tepat guna, serta pengendalian belanja yang lebih disiplin pada tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2023 dan 2024, peningkatan persentase realisasi belanja yang diimbangi dengan perencanaan anggaran yang lebih realistis memberikan sinyal positif terhadap kestabilan fiskal daerah. Ini tercermin dari meningkatnya penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan strategis seperti pembangunan infrastruktur dasar, digitalisasi layanan keuangan, dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Namun demikian, untuk mencapai kinerja ekonomi daerah yang lebih optimal, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur anggaran yang ada.

Rasio efisiensi yang cenderung berada di atas ambang batas ideal menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas belanja, bukan hanya kuantitasnya. Alokasi anggaran hendaknya lebih diarahkan kepada program-program prioritas yang mampu memberikan nilai ekonomi dan sosial yang tinggi, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan

vokasional, dan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, BPKAD Kota Jambi diharapkan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.